eJournal Ilmu Pemerintahan, 2021, 9 (3): 134 - 147

ISSN Cetak 2502-5961, ISSN Online 2502-597X ejournal.ip.fisip-unmul.org

© Copyright 2021

# PERAN MEDIA SEBAGAI REFERENSI PILKADA DI

**KOTA SAMARINDA (Studi Pada Program Acara Dialog PUBLIKA TVRI Kaltim)**

## Ferry Dwi Setiawan

eJournal Ilmu Komunikasi Volume 9, Nomor 3, 2021

eJournal Ilmu Komunikasi, 2021, 9 (3): 134-147

ISSN Cetak 2502-5961, ISSN Online 2502-597X ejournal.ip.fisip-unmul.org

© Copyright 2021

# PERAN MEDIA SEBAGAI REFERENSI PILKADA DI

**KOTA SAMARINDA (Studi Pada Program Acara Dialog PUBLIKA TVRI Kaltim)**

## Ferry Dwi Setiawan1, Erwiantono2, Kadek Dristina Dwivayani3

#### Abstrak

*Perkembangan Teknologi di zaman sekarang sudah sangat maju, dengan internet orang-orang sekarang sudah bisa mengakses media massa. Dengan kemajuan teknologi komunikasi peran media sekarang sudah menjadi multi fungsi selain dia sebagai penyebar berita atau informasi.*

*Peran Media dalam komunikasi politik begitu penting dalam massa pilkada. Peran media selain dia memberika referenshi tentang tata cara mengikuti pilkada yang baik dan benar, dia juga berperan sebagai alat ideology, mempengaruhi sikap, sebagai alat pembujuk dan sebagai mendefinisikan legitimasi dan realita.*

*Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa peran media sebagai pemberi referenshi pilkada di kota Samarinda yang berfokus pada program acara televisi milik TVRI kaltim yang berjudul dialog PUBLIKA. Penelitian ini bersifat deskriftif kualitatif dengan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran media massa pada ideology, sikap, membujuk dan mendefiniskan legitimasi dan realita begitu penting disaat kita menggunakan media massa.*

***Kata Kunci:*** *Komunikasi Politik, Media massa, Peran media*

1Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Falkultas Ilmu Sosial dan Ilmu polotik, Universitas Mulawarman. Email: Ferrydwisetiawan12@gmail.com

1. Dosen Peng

ajar dan Dosen pembimbing I: Ketua Laboratorium Pengembangan Masyarakat, Universitas Mulawarman

1. Dosen Pengajar dan Dosen Pembimbing II: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Mulawarman

**Pendahuluan**

Media massa sudah menjadi bagian dari masyarakat, baik media nasional maupun lokal, Pesatnya perkembangan informasi membuat perusahaan media massa semakin banyak. Media yang berkembang pesat yaitu media elektronik, salah satu di antaranya televisi. Perkembangan bukan hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga terjadi di tingkat provinsi. Perkembangan media yang saat ini telah menggabungkan audio dan visual, menjadikan masyarakat lebih dekat dengan media. Selain itu, media banyak menyediakan program hiburan yang mebuat media tersebut menjadi diminati oleh masyarakat.

Pilkada berkembang juga seiring berjalannya waktu. Saat ini pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administrasi setempat yang sudah memenuhi syarat. Pilkada dilakukan 5 tahun sekali. Media massa sangat vital berperan sebagai sebuah entitas negara dan masyarakat, karena pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dimaksudkan sebagai agenda pemilu di Indonesia, hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan reformasi guna mengembalikan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai. Peraturan ini telah diubah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, yang mengatur bahwa peserta pilkada juga bisa berasal dari mitra, calon didukung oleh banyak orang. Undang-undang tersebut diadopsi sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ketentuan tertentu dalam UU Nomor 23 tahun 2014 terkait peserta pilkada.

Robert A. Dahl (2016:86) mengatakan, “ciri-ciri negara demokrasi antara lain adalah tidak adanya pemerintahan tirani, pengakuan terhadap hak asasi manusia, dan adanya persamaan hak politik bagi setiap individu”. Dengan dimikian, jelas bahwa peilkada adalah hak milik setiap orang selama negara tersebut menganut paham demokrasi, bahkan dalam pengertian demokrasi sendiri secara sederhana adalah dalam suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala.

Masalah tahapan yang ada pada pilkada yaitu masalah pada tahap kampanye, menjadi salah satu permasalahan krusial lain, yang terjadi hampir di setiap daerah. Beberapa oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan keadaan kampanye menjadi seperti *black campaign* dan mencuri *start* kampanye dengan melakukan kampanye di luar waktu yang telah ditetapkan.

Samarinda akan melaksanakan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Oleh karena itu, TVRI mencoba memberikan referensi pilkada kepada masyarakat. TVRI menjadi referensi pilkada kepada masyarakat karena berstatus sebagai lembaga publik. berfungsi Selain untuk memberikan acara hiburan, TVRI sebagai lembaga publik juga berfungsi memberikan edukasi dan

informasi, sehingga lembaga publik juga berkewajiban untuk turut mengedukasi dalam bidang politik termasuk dalam penyelenggaraan pilkada.

TVRI Kaltim saat ini tengah gencar melakukan dialog terbuka dengan calon walikota agar bisa menyukseskan pilkada setra melakuan debat dengan masing-masing calon yang memajukan diri sebagai Walikota dalam sebuah acara bernama Dialog PUBLIKA. Dialog PUBLIKA adalah siaran yang tayang pada pertengahan tahun 2017. Acara ini sempat mengalami perubahan dalam pembuatannya. Awalnya, acara ini berperan untuk mewadahi suara-suara masyarakat, tetapi kemudian berubah perannya untuk membicarakan kejadian yang sedang hangat di wilayah Kalimantan Timur. Dialog PUBLIKA juga membicarakan tentang ekonomi, edukasi, informasi, dan politik di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, sebagai ibukota Kalimantan Timur. Selain membicarakan hal-hal seperti kenaikan ekonomi dan edukasi, Dialog PUBLIKA juga mempengaruhi keputusan politik untuk penontonnya.

Acara yang menyinggung kampanye pilkada akan sangat mempengaruhi pola pikir dan keputusan politik bagi penontonnya. Contohnya, calon kepala daerah sudah memiliki program tentang bagaimana cara agar kota Samarinda tidak lagi mengalami banjir, mengangkat perekonomian usaha kecil, serta pinjaman tanpa agunan, yakni meminjam, menabung, dan beribadah. Masyarakat yang menyaksikan berita ini akan merasa terinovasi dan membangkitkan keputusan politiknya untuk memilih calon tersebut.

TVRI memiliki pusat di Jakarta, tetapi TVRI memiliki cabang di setiap provinsi di Indonesia. TVRI Kaltim dapat dikelompokkan sebagai televisi lokal maupun nasional. Hal ini dikarenakan konten yang dihasilkan TVRI Kaltim tergantung jam tayangnya, sebagai contoh yakni tayangan lokal memiliki durasi 4 jam, mulai pukul 15.00 WITA sampai 19.00 WITA, dan selebihnya adalah tayangan nasional.

#### Rumusan Masalah

Bagaimana TVRI berperan sebagai media lokal dalam memberikan referensi kepada masyarakat luas tentang pilkada kota Samarinda?

#### Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran media TVRI Kaltim di saat pilkada, khusunya di kota samarinda***.***

#### Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yaitu:

1. Secara Teoritis penelitian ini agar masyarakat tahu tentang hasil pilkada saat ini. Sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis yang dilakukan di masa yang akan dating.
2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan serta masukan bagi pihak yang bersangkutan, khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui dan memberikan opini mengenai pemilihan kepala daerah.

#### Teori Komunikasi Politik

Dari pengertian komunikasi politik adalah komunikasi yang di arahkan kepada pencapaian suatu pengaruh, sehingga masalah yang di bahas oleh kegiatan komuniksai ini dapat mengikat semua warganya dengan sangsi yang ditentukan bersama melalui lembaga politik. Rush dan Althoff (1997) mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses ketika informasi politik yang relevan ditentukan dari suatu bagian system politik ke bagian lainnya, dan diantara system social dengan system politik.

Komunikasi polik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap system politik. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan yang terjadi pada saat enam fungsi lainnya di jalankan, yaitu sosialisasi dan rekruitmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, membuat peraturan, aplikasi peraturan dan ajudikasi peraturan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inhteren di dalam setiap fungsi system politik

Dalam memahami komunikasi politik sebagai salah satu fungsi partai politik, yaitu meyalurkan beragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa untuk di perjuyangakn menjadi kebijakan politik. Sedangkan menurut Maswadi Rauf, mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang dismapaikan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintah, dan aktivitas komunikasi dalam kedudukan sebagai pekaku kegiatan politik. Komunikasi politik di bagi dalam dua demensi yaitu kegiatan politik, pemyampaian pesan pesan yang bercirikan politik oleh katir- aktor politik kepada pihak lain. Kedua, kegiatan ilmiah, kegiatan politik dalam system politik.

Menurut Susanto (2013: 89) komunikasi politik adalah komonikasi politik yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sehingga masalah yang di bahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengingat semua warganya melalaui sangsi yang di tentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Nimmo berpandangan bahwa komunikasi politik menggunakan politik hanya untuk mengartikan kegiatan orang secara kolektif, yang pengatur perbuatan perbuatan mereka dalam konflik social.

Menurut McQuail (2011) kemonikasi politik adalah sebuah studi yang indisplinari yang dibangun atas berbagai macam disiplin ilmu, terutama dalam hubungannya antara proses komunikasi dan proses politik. Ia merupakan

wilayah pertarungan oleh persaiangan teori, pendekatan, agenda dan konsep dalam membnagun jati dirinya. Karena itulah komunikasi yang membicarakan tentang politik kadang dikalaim sebagai studi tentang aspek-aspek politik dari komuniaksi publik. dan sering di kaitkan dengan komunikasi kampanye pemilu (elections campaing), katena mencakup masalah persuasi terhadap pemilih, debat antar kandidat, dan penggunaan media masa sebagai alat kampanye.

Menurut Bungin (2003: 72), “media massa adalah sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Media massa diartikan sebagai media dan media informasi yang menyebarkan informasi massa, dalam artian masyarakat dapat mengakses media massa secara luas”. Media massa adalah alat atau sarana untuk menyebarkan informasi, konten berita, opini, ulasan, hiburan, dan lain-lain. Menurut Canggara (2010: 123, 126), “media merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari penyebar kepada khalayak, sedangkan media massa sendiri merupakan alat untuk menyampaikan informasi dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, dan televisi”.

Semua aspek ini membuat masyarakat atau warga negara sendirian menghadapi kapitalisasi media. Tentu saja berbagai proposisi yang sering dikemukakan menunjukkan bahwa perkembangan media mencerminkan perkembangan masyarakat, dengan kata lain masyarakatlah yang mempengaruhi perkembangan media ke arah tertentu.

Coleman (1999) menunjukkan “peran media baru dalam layanan subversif dari ekspresi bebas di bawah persyaratan kontrol otoriter alat-alat komunikasi.” (2011:169) Tidak mudah bagi pemerintah untuk mengendalikan akses pada dan penggunaan Internet oleh warga negara yang berbeda pendapat, tetapi juga bukannya hal tersebut tidak mungkin. Bagi pemerintah untuk mengendalikan akses pada dan penggunaan Internet oleh warga negara yang berbeda pendapat, tetapi juga bukannya hal tersebut tidak mungkin. Media elektronik baru secara luas disambut sebagai cara yang potensial untuk lari dari politik ‘top-down yang opresif dari demokrasi massa, di mana partai politik yang terorganisasi secara ketat membuat kebijakan secara sepihak dan memobilisasi dukungan di belakang mereka dengan perundingan dan masukan akar rumput yang minimal. Mereka menyediakan alat untuk penyediaan informasi politik dan gagasan yang sangat dibedakan, akses yang hampir tidak terbatas dalam teori unt uk semua suara, dan banyak umpan balik dan perundingan antara pemimpin dan pengikut. Mereka menjanjikan forum-forum baru bagi perkembangan kelompok kepentingan dan pembentukan opini. Mereka memungkinkan dialog berlangsung antara politikus dan warga negara yang aktif tanpa campur tangan mesin partai yang tak terhindarkan.

**Media Massa dan Komunikasi Politik**

Kemampuan media untuk membentuk mode partisipasi baru mendukung penyebaran demokrasi ke pelosok dunia yang paling terpencil (Castells, 2010; Mansell, 2004:57). Menurut Herman dan Chomsky, “media selalu berisiko dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh "kelompok-kelompok khusus", yang lebih berkuasa dibandingkan kelompok lain di masyarakat. Partai yang lebih berkuasa mendapatkan keuntungan paling banyak, sedangkan partai yang kurang berkuasa kehilangan hak istimewa untuk menjadi peserta aktif di ruang publik. Kepentingan masyarakat, terutama kepentingan kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan, telah diabaikan, karena tujuan utama dari manipulasi tersebut adalah untuk mempertahankan kendali atas kekuasaan masyarakat.

#### Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan lazimnya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pasca perubahan amandemen UUD 1945, semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan presiden serta kepala daerah dipilih dengan mekanisme pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi agenda yang diselenggarakan secara berkala di Indonesia.

Menurut John Locke dari penelitian Andi Muhammad Gian Gilland adalah menyangkut pembagian kekuasaan, pengertiannya dengan pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dapat diartikan adanya pemecahan kekuasaan yang berbeda satu sama lain, baik mengenai fungsi maupun mengenai orangnya.

Ibnu Tricahyo (2009:6) mendefinisikan pemilihan umum sebagai berikut: “Secara umum, pemilihan umum adalah alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang sah, dan sarana untuk mengungkapkan keinginan dan kepentingan rakyat”.

Definisi di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan membentuk pemerintahan yang sah, juga sebagai sarana untuk mengungkapkan keinginan dan kepentingan rakyat Indonesia, bertujuan untuk melibatkan rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh perwakilan rakyat di parlemen bersama dengan demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung

#### Konsep Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi memandang manusia sebagai pemilik kedaulatan, dan kedaulatan disebut asas kedaulatan rakyat. Kata “demokrasi” merupakan gabungan dari “*demos*” (artinya rakyat) dan “*crato/cratein*” (artinya

pemerintahan), sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat.

Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

### Metode Penelitian

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moloeng 2007: 4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai, “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ekspresi tertulis atau lisan masyarakat dan mengamati perilaku dari fenomena”. Selain itu (Moleong 2007: 11), penelitian deskriptif lebih menekankan pada penggunaan data kualitatif dalam bentuk kata, gambar, bukan angka.

Penelitian ini memfokuskan pada peran media, sebagai acuan pilkada di Kalimantan Timur Kota Samarinda (kajian proyek dialog PUBLIKA TVRI Kaltim) sebagai alat ideology, pembujuk, mempengaruhi sikap, dan mendefinisikan legitimasi.

Peneliti melakukan wawancara kepada *key informant* dan *Informant* yang berkompeten untuk memberikan data secara akurat dan tepat. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiyono (2016:85) adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan memeperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Teknik pengumpulan data yang sesuai dengan penulisan skripsi ini,

yaitu:

1. Peneliti lapangan (*field research*), yaitu peneliti langsung ke lapangan dengan cara:
	1. Observasi

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung yaitu mengamati siaran acara dialog PUBLIKA melewati media televisi dan media sosial.

* 1. Wawancara

Pengamatan data melalui wawancara secara mendalam kepada *key informan* dengan persyaratan kriteria tertentu.

* 1. Dokumentasi

Pengumpulan data yang di lakukan dengan cara kategori dan klarifikasi bahan tertulis maupun berupa gambar, dimana dokumen ini sebagai

bahan perlengkapan dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

#### Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah pada peran media, sebagai acuan pilkada di Kalimantan Timur (kajian proyek dialog PUBLIKA TVRI Kaltim), sebagai berikut:

1. Ideology
2. Pembujuk
3. Sikap
4. Legitimasi

#### Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini penulisan menggunakan informan sebagai sumber memperoleh data untuk penulisan skripsi ini. Pemilihan informan didasarkan pada subjek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data. Penelitian ini peneliti tidak mengambil semua objek yang dijadikan pengamatan, melainkan hanya sebagian dari objek yang diteliti dan bersedia memberikan data.

Penyedia informasi Moleong (2004: 90) adalah, “orang yang memberikan informasi tentang latar belakang dan kondisi penelitian. Bagi peneliti, pemanfaatan informasi adalah untuk memperoleh banyak informasi dalam waktu yang relatif singkat, hal ini dikarenakan penyedia informasi terbiasa berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan peristiwa yang ditemukan dari topik lain”.

Dalam penelitian ini peneliti memilih *key informan* sebagai berikut:

* 1. Nama: I Made Kertayasa Umur: 32

Pekerjaan: produser siaran Dialog PUBLIKA

Dan untuk Informannya adalah:

1. Nama: Firman Hidayat Umur: 42

Pekerjaan: Ketua KPU Samarinda

1. Juariah Umur: 50

Pekerjaan: Ibu rumah tangga

1. Nama: Leni NorCahyani Umur: 40

Pekerjaan: Ibu rumah tangga

1. Nama: Agus Setiawan

Umur: 32

Pekerjaan: Kuli banggunan

Penunjukan *key informan* dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling.* Sebagaimana yang dinyatakan Soegiyono (2016:85) bahwa *purposive sampling* merupakan teknik penetuan sampel untuk tujuan tetentu saja.

Untuk menunjang penelitian yang di lakukan maka diperlukan data- data yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun jenis data-data tersebut antara lain:

1. Data primer

Data yang di peroleh dari lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan key informan. Wawancara di lakukan dengan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur

1. Data sekunder

Adapun sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research) dan wawancara dengan informan-informan media yang bersangkutan.

#### Teknik Pengumpulan Data

1. Peneliti lapangan (*field research*)
2. Pengumpulan data dengan berhadapan langsung dengan cara:
	1. Observasi
	2. Wawancara
	3. Dokumentasi

#### Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan dalam bentuk kata, gambar, bukan angka. Kemudian mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari manuskrip, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan lain-lain sehingga dapat memperjelas kenyataan atau fakta.

### Hasil Penelitian

#### Sekilas Tentang TVRI Kaltim dan Dialog PUBLIKA

*Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Stasiun Kalimantan Timur* atau yang biasa disingkat LPP TVRI Kaltim atau TVRI Kalimantan Timur di dirikan pada tahun 1993 di Kota Samarinda merupakan satu televisi daerah milik pemerintah Indonesia yang berkantor di jalan Ery

Suparjan, Kota samarinda. TVRI Kaltim me-relay 92% perkara pada TVRI nasional dan sisanya, TVRI Kaltim menciptakan program khusus provinsi Kalimantan Timur yang ditayangkan mulai pukul 16.00 - 20.00 WITA.

Awal mula Dialog PUBLIKA tayang pada tahun 2017. Kemudia mengalami beberapa perubahan, dari dulunya khusu di hari sabtu sebagai acara khusu untuk menjadi wadah suara-suara masyarakat. Kemudia semakin bergeser ketahun 2017, PUBLIKA mulai berubah menjadi program dialog yang tayang hampir setiap hari.

PUBLIKA sempat tayang pada hari senin sampai kamis dan kemudian pada awal tahun 2018, sekarang tayang pada hari selasa sampai hari sabtu. Untuk reting dan sasarang penontonya adalah dewasa, karena bahasan PUBLIKA disini adalah program dialog, diskusi yang menhadirkan isu atau tema-tema yang terkini contohnya: politik, social, ekonomi dan pendidikan.

#### Ideology

Ideologi dapat dianggap sebagai [visi](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Visi&action=edit&redlink=1) yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu secara umum, atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit.

Pada tahap ini, peneliti menayakan bagaimana infroman mengetahui dan melihat tentang pemberitaan PUBLIKA tentang pilkada. Sebagaiaman kampanye tentang pilkada Samarinda terjadi dimana-mana, melalui kampanye melalui internet dan sebagainya sehingga media massa berhasil menarik dan mengarahkan perhatian pada calon tertentu.

Ideologi semua orang berbeda-beda tapi tetap mengikuti ideology yang dianut oleh negara Indonesia. Menurut mereka ideology mereka tetap demokrasi Pancasila dan mereka punya hak untuk bebas memilih.

Sebagai contoh kita tunduk pada demokrasi pancasila maka sistem pemerintah yang dilaksanakan disesuaikan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi negara ini serta Terdapat pemilihan umum secara konsisten dan berkesinambungan. semua pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, perlu didasarkan dengan musyawarah yang mufakat dan solusi atau gagasan pemecahan masalah tidak berasal dari sumber suara terbanyak, namun gagasan yang dirasa paling baik.

Dalam hal ini TVRI kaltim berperan sebagai penarik dan pengarah perhatian masyarakat. Disini ideologi masyarakat digiring ke ideology demokarasi Pancasila, dalam demokrasi tersebut musyawarah untuk mufakat sangat diharapakan, tapi jika tidak tercapai mufakat maka keputusan dapap

ditempuh melalui pemungutan suara. Dalam buku Pancasila karya Suparman (2012), dalam bentuk negara modern, keuasaan poltik dapan dijalan secara baik manakala di dalam penyelnggaran pemerintahan menggunakan prinsip dan system demokrasi. Yang berati pihak tertentu tidak memaksakan kehendaknya pada masyarakat karena itu diluar mufakat.

#### Pembujuk

Selain sebagai lembaga public TVRI yang membujuk masyarakat, TVRI juga memiliki pungsi sebagai wadah untuk mengeluarkan anggapan dan pendapat. Setiap orang bebas mengemukan pendapat serta untuk menyapaikan tanggapan baik itu pikiran dengan lisan. Tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahap ini peneliti menayakan bagaimana informan acara dialog PUBLIKA membujuk, mengeluarkan pendapat dan tangapan mengenai pilkada. Mengingat arti PUBLIKA secara khusu menjadi wadah suara-suara masyarakat baik itu mengeluarkan pendapat maupun mengeluarkan tanggapan.

Sebagai contoh media massa memiliki kekuatan untuk membujuk atau merayu pendengar, penonton atau pembacanya: kampanye agar masyarakat membayar pajak, atau agar menabung di bank dan sebagainya. Selain itu Berdasarkan pengertian media sosial dapat diartikan bahwa semua orang bebas menyampaikan pendapat, saling melempar komentar, menyebar berbagai informasi. Media sosial tidak memiliki pengawas yang mengawasi berbagai macam media sosial dalam melakukan interaksi. Menurut McQuail (2000) pada dasarnya ingin menunjukan bahwa peran media dalam kehidupan sosial bukan hanya sebagai sarana hiburan atau pelepas ketegangan, melainkan isi dan informasi yang disajikan mempunyai peran yang signifikan dalam proses sosial.

Acara dialog PUBLIKA TVRI kaltim dulunya sebagai wadah tanggapan masyarkat yang akan dibaca seminggu sekali. Namun seiring berjalannya waktu sekarang PUBLIKA bisa langsung melakukan tanya jawab dengan penonton baik itu di dalam studio TVRI kaltim maupun diluar TVRI kaltim, selain itu dialog PUBLIKA juga bisa membujuk penontonya untuk percaya pada berita- beritanya.

#### Sikap

Media memiliki pengaruh besar pada masyarakat dan dalam

pengalaman hidup kita. Kita terkadang mencoba untuk menerapkan konsep- konsep ini dalam kehidupan kita sehari-harinya, contohnya seperti cinta, fashion, olah raga dan berita dunia. Media seperti ini kadang-kadang bisa memberika efek postif dan negative kehidupan kita semua.

Isi siaran media massa merupakan konsumsi otak bagi masyarakat, sehingga apa yang ada di media massa akan mempengaruhi sikap subjektif pelaku interaksi sosial, dikarenakan media adalah mata manusia untuk melihat dunia, hal ini menunjukan peran aktif media dalam menyajikan informasi kepada masyarakat.

Menurut Berkowitz dalam Saiffudin Azwar (2013:4) sikap merupakan suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut. Sedangkan menurut thurstone dalam Saiffudin Azwar (2013:5) sikap merupakan derajat efek positif atau efek negative terhadap suatu objek psikologis.

TVRI kaltim disini, dalam membuat berita harus bisa menggiring sikap ponotonya kerah positif. Karena untuk mencegah terjadinya opini negative untuk subjek atau pelaku tidak menjadi korban bully pada orang-orang yang sikapnya berubah karena suatu berita yang belum sampai tahap akhir.

#### Legitimasi

Legitimasi adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradiJlan, dapat pula diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan dan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Realitas adalah kenyataan yang sedang terjadi sekarang, baik itu sedang terjadi di lapangan maupun dilingkungan sekitar kita.

Legitimasi merupakan salah satu konsep penting yang dikupas dalam kajian Ilmu Politik. Surbakti (2009) menekankan bahwa legitimasi dalam suatu praktik kekuasaan politik adalah sangat penting. Sebab, legitimasi berkaitan dengan keabsahan atau penerimaan masyarakat terhadap penguasa atau pihak yang memiliki otoritas. Seandainya suatu kekuasaan tidak terlegitimasi, maka akan muncul pembangkangan politik yang membuat keadaan kepemimpinan tidak kondusif bekerja.

Legitimasi dapat menciptakan kestabilan politik dan perubahan sosial. Penerimaan dan pengakuan masyarakat menciptakan kestabilan pemerintahan dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan serta mampu dengan baik dalam mengatasi sebuah permasalahan, dibandingkan pemerintahan yang kurang atau tidak memiliki legitimasi.

Legitimasi dapat menciptakan kestabilan politik dan perubahan social. Penerimaan dan ppengakuan masyarakat menciptakan kestabilan pemerintahan dalam mebuat berbagai keputusan dan kebijakan serta mampu dengan baik dalam mengatasi sebauh permasalahan, dibandingan pemerintahan yang kurang atau tidak memiliki legitimasi.

Peran TVRI kaltim disini sebagai media massa adalah menyebar luaskan tentang legitimasi pemerintah serta fakta tentang legitimasi tersebut. Sebagai lembaga public TVRI kaltim tentu menjadi tempat masukan kritikan dari masyarakat tentang sebuah legitimasi pemerintah, oleh karena itu, TVRI kaltim tetap menyebar luaskan tentang realita sebuah legitimasi ke masyarakat.

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitain pembahasan ini bahwa Referensi pilkada untuk masyarakat kota samarinda terpunuhi dengan adanya acara dialog PUBLIKA.

Media massa sangat berpengaruh sekali terdahap kehidupan social bagi masyarakat. Media sebagai jendela untuk mengetahui tentang apa yang terjadi di luar sana, seperti di luar daerah atau yang lebih luas lagi luar negeri, media sebagai pemberi isu, informasi dan sebagainya bagi masyrakat, serta terjadinya komunikasi interaktif pada masyarakat. Media massa selain sebagai jendela juga menjadi wadah untuk menampung tanggapan dan pendapat masyarakat. Selain dia juga membujuk orang-orang dalam mengikuti ajuran-ajuran pemerintah.

Selain itu sebagai lembaga penyiaran public TVRI kaltim sangat berperan penting dalam membentuk sikap masyarakat. Bagaimana sebuah berita mempengaruhi masyarakat yang membuat mereka memiliki opini tersendiri untuk setiap calon yang memajukan dirinya sebagai kepala daerah kota samarinda.

Media massa juga bisa sangat berpengaruh terhadap ideology si penonton. Walau semua media massa menggunakan ideology demokrasi Pancasila, ada saja yang oknum-oknum yang kadang mekasakan kehendaknya.

Media massa juga berperan sebagai penyebar luar suatu peraturan atau legitimasi pemerintah yang baru. Tentu saja media massa juga akan merilis fakta dan realita tentang legitimasi tersebut apakah itu efektif bagi masyarakat atau tidak.

#### Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah di jabarkan sebelumnya, maka penulis akan mengemukakan saran yang mungkin dapat di jadikan masukan TVRI kaltim. Peneliti harap saran dan masukan ini dapat memberikan pengaruh positif bagi baik TVRI kaltim dapat menyapaikan berita. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Acara-acara di TVRI kaltim kurang dikenal. Data ini ditemukan peneliti saat melakukan wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa dari 3 penonton cuma 1 yang tau tentang dialog PUBLIKA selebihnya lebih mengenal TVRI kaltim dengan acara kaltim hari dan Sekitaran etam. Hal ini wajar di karenakan jam tayang acara PUBLIKA bertabrakan dengan acara TV nasional contohnya seperti repotasi sore dan sebagainya.
2. Bagi TVRI kaltim disaat memberikan contoh atau referensi pilkada kepada masyarakat harus dilakukan lebih lugas lagi, sehingga orang-orang akan mudah dipahami oleh penonton terutama yang masih asing dengan tata cara pilkada

### Daftar Pustaka

Azwar, Saiffudin. 2013. Sikap manusia teori dan pengkurannya. Yogyakarta.: Pustaka Pelajar

Bungin, Burhan. 2003. Porno Media, Konsentrasi Sosial, Teknologi Telematika, dan Perayaan Seks di Media Massa. Jakarta Timur: Prenada Media.

Cangara, Hafied. 2010. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Humanika, Salemba. 2011. Teori Komunikasi Massa McQuali. Jakarta Humaizi. 2018 Uses And Gratifications Theory. Medan: USU Press

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.

Susanto Harry Eko.2013. Komunikasi Politik Jil 1: Pesan, Kepemimpinan dan Khalayak. Jakarta. Mitra Wancana Media**.**

Redaksi Bmedia. 2016. UUD 1945 & Perubahannya.

Ritonga Yanti Elfi, 2018. Teori Agenda Setting Dalam Ilmu Komunikasi.

Sumatera Utara: SIMBOLIKA VOL.4

Tjakrawerdaja, Subiakto. 2016 Demokrasi Pancasila, Jakarta: Universitas Trilogi

Tricahyo, Ibnu. 2009. Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal. Malang: In Trans Publishing.

### Sumber Jurnal dan Skripsi

Arif Budi Prasetya 2014 KIPRAH NEW MEDIA DALAM PENCATURAN POLITIK DI INDONESIA

Maharani Aliwati 2018 *KAMPANYE POLITIK DI MEDIA MASSA PASANGAN ADANG DARADJATUN-DANI ANWAR DALAM MASA KAMPANYE PILKADA DKI 2007*

Mahpuddin 2010 *IDEOLOGI MEDIA MASSA DAN PENGEMBANGAN CIVIL SOCIETY*

Nurul Syobah 2012 *PERAN MEDIA MASSA DALAM KOMUNIKASI POLITIK*